



Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)

Penanggungjawab:
Djustiawan Widjaya

Tim Penulis:
Sukmalalana
Andri Oktaviani

Komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Layanan Air Minum di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Tengah

Isu Strategis

Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia tentunya memiliki komitmen untuk mencapai *universal access* air minum layak sesuai tujuan ke-6 *Sustainable Development Goals/SDGs*. Satu diantara bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dituangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menyebutkan target 100% akses air minum layak (termasuk 15% rumah tangga dengan akses air minum aman) pada akhir tahun 2024. Bentuk komitmen lainnya adalah dengan terus mendorong akses air minum layak melalui pembangunan SPALD-T (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat) dan SPALD-S (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat) sebagaimana dijelaskan

Daftar Provinsi Dengan Rumah Tangga (Peringkat 10 Besar Terendah) Pencapaian Akses Air Minum Layak (Persentase)

2022			
Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Total
Lampung	88,39	78,48	81.60
Papua Barat	93,53	72,90	81.57
Kep.Bangka Belitung	85,62	74,82	80.96
Kalimantan Barat	88,86	75,65	80.43
Jambi	90,66	73,78	79.19
Sulawesi Barat	96,26	74,77	78.98
Kalimantan Tengah	87,75	69,49	77.01
Kalimantan Selatan	87,16	65,60	76.18
Bengkulu	83,75	67,90	73.07
Papua	90,00	56,54	65.39

Basuki Hadimuljono (2022) selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejalan perkembangan dari pelaksanaan RPJMN tersebut, diketahui kondisi capaian layanan akses air minum layak di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian, dimana pada tahun 2022 (BPS, 2023) terhitung 19 dari 34 (55,88%) provinsi memiliki persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dibawah rata-rata nasional yaitu dibawah 91,05%. Diantara Provinsi tersebut adalah Kalimantan Tengah dengan capaian akses air minum layak hanya 77,01% sekaligus menjadi salah satu Provinsi

dari 10 besar terendah layanan akses air minum layak. Menariknya, capaian akses layanan air minum layak yang rendah di Prov. Kalteng tersebut terjadi ditengah kondisi daerah yang memiliki 11 sungai besar dengan panjang secara total mencapai 4.625 KM dan memiliki jumlah penduduk 2.741 075 jiwa dengan 768.239 KK.

Permasalahan

Selain hal tersebut di atas, berbagai hambatan juga dirasakan Pemprov. Kalteng dalam pemenuhan layanan akses air minum layak, diantaranya, **aspek geografis**, dimana sebagian besar kondisi air sungai yang terdapat di wilayah Prov. Kalteng semakin mengeruh dan tercemar akibat dari dampak penambangan emas, batu bara, penebangan lahan untuk perkebunan kelapa sawit sehingga tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat, bahkan sekarang ini harus melalui beberapa kali penyaringan karena kekeruhannya cukup tinggi.

Begitu juga hambatan dari **aspek pendanaan**, dimana sektor air minum masih belum menjadi prioritas Pemda (bukan sektor yang “sexy” seperti halnya infrastruktur jalan, jembatan dan infrastruktur strategis lainnya), sehingga alokasi pendanaan dari pemerintah daerah untuk membiayai sektor air minum sangat minim dan masih sangat bergantung kepada anggaran pemerintah pusat (APBN). Tidak ada dana *sharing* dari APBN dan APBD yang ada adalah APBN untuk menangani yang menjadi kewenangan pusat dan merupakan kawasan prioritas/strategis nasional; APBD provinsi menangani yang menjadi kewenangan provinsi dan kawasan prioritas/strategis provinsi; APBD kab/kota menangani kewenangan kab/kota. Tidak ada penetapan persentase untuk alokasi anggaran sektor air minum dan sanitasi. Pada dasarnya alokasi anggaran untuk air minum dan sanitasi dari pemprov dan kab/kota masih belum optimal. Kemudian untuk pemanfaatan anggaran melalui Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) APBDes juga belum termanfaatkan secara optimal, karena masih terkendala dengan regulasi yang ada.

Sedangkan dari **aspek regulasi** atas kebijakan pendukung program pemenuhan air minum layak untuk tingkat Provinsi maupun Kab/Kota masih tergolong minim, seperti Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Air Minum baru disusun tahun 2022 (dimana saat ini tahap finalisasi dan penyusunan Pergub) dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Provinsi juga belum ada. Selain itu, dokumen perencanaan air minum Kab/Kota (RISPAM, RAD AMPL) belum menjadi pedoman dalam perencanaan dan penganggaran program kegiatan air minum layak. Bahkan rencana program kegiatan bidang perumahan, air minum layak masih belum sepenuhnya didukung dengan *readiness* kriteria yang dipersyaratkan pemerintah (al. FS/ DED, Data teknis *update*, lahan bersertifikat, kesiapan daerah terhadap keberlanjutan infrastruktur yang akan dibangun, dsb).

Secara khusus di Kota Palangkaraya-Prov.Kalteng, BPK RI (2021) dalam hasil pemeriksaannya atas efektivitas upaya penyediaan air minum yang memenuhi syarat kuantitas, kualitas, dan kontinuitas TA 2020 dan semester I 2021 juga menemukan adanya permasalahan pada rencana kebutuhan produksi dan distribusi air minum pada Perumdam Palangka Raya yang belum sepenuhnya disusun secara memadai serta Perumdam Palangka Raya belum mengimplementasikan pemeliharaan sarana dan prasarana secara memadai. Begitu pun Dewan Pengawas belum sepenuhnya melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Perumdam Palangka Raya secara komprehensif dan terdokumentasi, terutama ketika Perumdam Palangka Raya belum sepenuhnya mengimplementasikan pengendalian kehilangan air dan pelaporannya secara memadai.

Rekomendasi

Berdasarkan data-data air minum layak dan permasalahan Prov. Kalteng tersebut di atas kiranya dapat menjadi perhatian Komisi V DPR-RI dalam rangka mengawal, mendorong dan memastikan agar pemenuhan dan penyediaan air minum layak terpenuhi. Untuk itu Komisi V agar mendorong Pemerintah dhi.

- a. Kementerian PUPR agar melakukan Koordinasi dengan Pemprov Kalteng dalam menyelenggarakan penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat untuk mendukung pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang layak dan aman pada Kalimantan Tengah
- b. Mengalokasikan dana yang memadai untuk penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat pada Pemprov Kalteng
- c. Melakukan penyelesaian kebijakan dan strategi pengembangan sistem air minum yang dimuat dalam Peta Jalan (*Roadmap*), dan akan menjadi acuan bagi pemerintah, lembaga non kementerian dan Pemda dalam percepatan penyediaan air minum layak
- d. Mendorong Kemendesa PDTT untuk menyusun regulasi terkait pemanfaatan anggaran DD dan ADD dalam APBDDes dalam rangka pendanaan sektor pemenuhan/penyediaan air minum dan sanitasi layak.

Referensi

- Antara Kalteng (2022). "Air Sungai di Kalteng Semakin Keruh, Pemerintah Diminta Lakukan Pemulihan". *Berita*. Diakses dari <https://kalteng.antaranews.com/berita/580561/air-sungai-di-kalteng-semakin-keruh-pemerintah-diminta-lakukan-pemulihan> pada 3 Maret 2023
- Bappedalitbang Prov.Kalteng (2023). "Sanitasi dan Air Minum di Provinsi Kalteng". *Paparan Diskusi*. Palangka Raya.
- BPK RI (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK atas efektivitas upaya penyediaan air minum yang memenuhi syarat kuantitas, kualitas, dan kontinuitas oleh Pemerintah Kota Palangka Raya serta Instansi terkait TA 2020 dan semester I 2021*. Jakarta.
- BPS (2022). "Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Sumber Air Minum Layak (Persen), 2020-2022". *Data Publikasi*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/29/854/1/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-tipe-daerah-dan-sumber-air-minum-layak.html> pada 3 Maret 2023
- BPS (2022). "Jumlah Penduduk (Jiwa), 2020-2022 Provinsi Kalimantan Tengah". *Data Publikasi* Diakses dari <https://kalteng.bps.go.id/indicator/12/390/1/jumlah-penduduk.html> pada 3 Maret 2023.
- Disdukcapil Kalteng (2022). "Data Konsolidasi Bersih Provinsi Kalimantan Tengah". Diakses dari <https://disdukcapil.kalteng.go.id/semester-i-tahun-2022/> pada 3 Maret 2023
- PU.go.id (2022). "Wujudkan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman, Menteri Basuki Dorong Peran Aktif Semua Lapisan Masyarakat". *Berita*. Diakses dari <https://pu.go.id/berita/wujudkan-akses-air-minum-dan-sanitasi-aman-menteri-basuki-dorong-peran-aktif-semua-lapisan-masyarakat> pada 3 Maret 2023